

# **IMPLIKASI EFISIENSI KINERJA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA**

**TAHUN 2012-2015**

Rina Desiana<sup>1</sup>

Sidik Tono<sup>2</sup>

## **ABSTRAK**

Kehadiran Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang beroperasi pada skala usaha kecil dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat menggariskan adanya perhatian khusus dalam mendayagunakan zakat sebagai salah satu instrumen keuangan Islam yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Dewasa ini, muncul berbagai isu efisiensi pengelolaan dana zakat yang tidak akan mampu membangun kapasitas organisasinya agar secara ekonomi, sosial, dan keuangan dapat berkelanjutan dalam mencapai tujuannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi efisiensi kinerja OPZ, sehingga kehadiran dan program-program yang dimilikinya dapat berimplikasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Menggunakan metode penelitian kombinasi. Perolehan tingkat efisiensi tersebut menunjukkan pencapaian efisiensi dalam pengelolaan zakat berimplikasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, di mana perolehan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2012-2015 mengalami penurunan yang signifikan. Dengan demikian, adanya OPZ yang mengelola zakat secara efisiensi dapat menjadi salah satu kontribusi dalam penurunan kemiskinan di Indonesia melalui berbagai program baik penghimpunan maupun penyalur secara berkelanjutan.

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Studi Islam pada UIN Sultan Kalijaga Yogyakarta.

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Studi Islam pada UIN Kalijaga Yogyakarta.

Kata Kunci: Implikasi, Efisiensi Kinerja, OPZ, Kemiskinan

## A. PENDAHULUAN

Islam menjadikan instrumen zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Hal ini mengingatkan tidak semua orang mampu bergelut dalam kancan ekonomi. Maka zakat merupakan sumber dana yang potensialnya untuk mengentaskan kemiskinan.<sup>3</sup> Maka zakat merupakan ibadah *maaliiyah ijtima'iyyah* memiliki posisi sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan umat.

Menjelang tahun 2000-an lahir berbagai organisasi pengelola zakat *maal*, disebut juga Badan Amil Zakat (BAZ) untuk menghimpun dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS), sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 7 menyatakan bahwa "Badan Amil Zakat mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusi, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama". Organisasi pengelola zakat *maal* tersebut ada yang berbentuk lembaga dari pemerintahan dan ada beberapa dalam bentuk lembaga non-pemerintahan atau swasta.

Masalah kemiskinan di Indonesia telah menjadi topik pembicaraan dan fokus kebijakan pemerintah dalam RAPBN dan juga masalah kemiskinan ini dituangkan dalam UUD 1945 dengan menitikberatkan tanggung jawab negara atas kelayakan kehidupan warganya. Berdasarkan Berita Resmi Statistik dari BPS (Biro Pusat Statistik) dari 2012 sampai 2015 tingkat kemiskinan mengalami penurunan secara signifikan yaitu dari 11,96% menjadi 11,22%.<sup>4</sup> Adanya penurunan garis kemiskinan Indonesia dari 2012 sampai 2015, adalah bukti adanya upaya pemerintah dalam

menurunkan tingkat kemiskinan. Organisasi pengelola zakat adalah salah satu program pemerintah, yang mana Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan telah mengesahkan 19 Organisasi Pengelola Zakat pada akhir tahun 2011 sampai 2013.

Beranjak dari Berita Resmi BPS tentang tingkat kemiskinan tersebut dan kehadiran badan atau lembaga penyalur dana zakat yang memiliki salah satu misi yaitu pengentasan kemiskinan, dan sebagai salah satu tujuan zakat adalah sebagai salah satu sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial. Maka tampaknya perlu adanya analisis efisiensi kinerja pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), yang mana kehadirannya sebagai lembaga atau badan penghimpun dan penyalur dana zakat, serta implikasi kinerja organisasi pengelola zakat terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kombinasi atau disebut Metkom, yaitu suatu penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian.<sup>5</sup> Maka untuk menganalisis tingkat efisiensi OPZ digunakan jenis penelitian kuantitatif dengan perhitungan efisiensi dengan menggunakan metode non-parametrik membutuhkan suatu pendugaan fungsi sebagai *frontier*, yaitu dengan salah satu metodonya *DataEnvelopmentAnalysis* (DEA) dengan model VRS (*Variable Return to Scale*), maka dapat dilakukan melalui pendekatan berorientasi keluaran (*output-oriented approach*) untuk pengukuran efisiensi teknikal. Selanjutnya untuk menganalisis implikasi efisiensi OPZ terhadap tingkat kemiskinan digunakan jenis penelitian kualitatif dengan

<sup>3</sup> Rozalinda, Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 249.

<sup>4</sup> Berita Resmi Badan Pusat Statistik (BPS) No. 06/01/Th. XVIII, 2 Januari 2015,

<sup>5</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 404.

etode analisis deskriptif, yaitu mendeskripsikan hasil dari analisis tingkat efisiensi OPZ.

Input dan output dari Organisasi Pengelola Zakat harus ditentukan terlebih dahulu, yaitu menggunakan pendekatan produksi. Pendekatan produksi melihat Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai produsen yang melahirkan dua produk utama, produk dana terhimpun dan dana tersalurkan. Variabel input dan output yang telah ditentukan dari laporan keuangan etiap lembaganya adalah sebagai variabel independen dalam penelitian ini. Variabel input dan output yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

gambar 1

#### Variabel Input dan Output

Variabel Input	Kategori Variabel	Indikator	Unsur	Status
Aliran Uang	Rasio kredit yang diberikan dalam rumah tangga	Tentu, seiring, atau tidak linear, kandungan	Rupiah (Rp)	Rasio
Baya Operasional	Baya yang dikembalikan oleh OPZ yang tidak berkenaan dengan anggaran dana operasional dan dana jasa sosial	Pihak ketiga, baya konsumsi, baya sumber, bahan baku	Rupiah (Rp)	Rasio
Variabel Output	Kategori Variabel	Indikator	Unsur	Status
Dana Terhimpun	Total penghimpunan dana untuk dan tidak untuk	Seluruh dana yang diperoleh dan hasilnya	Rupiah (Rp)	Rasio
Dana Tersalurkan	Total pembiayaan dana untuk dan tidak untuk	Seluruh dana yang dialokasikan kepada masyarakat pada tahun berjalan sebagai modal	Rupiah (Rp)	Rasio

Sumber: Data diolah, 2016

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2012 sampai pada tahun

dideskripsikan berdasarkan nilai efisiensi kinerja OPZ untuk mengetahui implikasinya terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

#### C. PENGERTIAN IMPLIKASI

Implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain, implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.<sup>6</sup> Maka implikasi merupakan efek atau dampak yang dirasakan ketika konsep globalisasi sudah benar-benar diterapkan oleh suatu Negara.

Pembahasan dalam implikasi dari sebuah kebijakan menggunakan lima dimensi, yaitu:

1. Implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat.
2. Kebijakan mungkin mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan.
3. kebijakan mungkin akan mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang.
4. evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik.
5. biaya-biaya tidak langsung yang ditarunggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.<sup>7</sup>

Implikasi juga merupakan akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat

<sup>6</sup> M. Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), him. 114-115.

<sup>7</sup> Budi Winarto, Teori dan Proses Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Media

bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut.<sup>8</sup>

#### D. KONSEP EFISIENSI

Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis merupakan salah satu kinerja yang mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi. Konsep Efisiensi pertama kali diperkenalkan oleh Farrel yang merupakan tindak lanjut dari model yang diajukan oleh Debreu dan Kopmas.<sup>9</sup> Menurutnya efisiensi pada suatu unit kerja ekonomi atau perusahaan selalu berkaitan dengan bagaimana cara menghasilkan tingkat output yang maksimal dengan jumlah input tertentu.<sup>10</sup>

Efisiensi secara umum didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan output tertentu dengan menggunakan input tertentu dalam porsi seefisien mungkin, sehingga efisiensi merupakan tingkat output tertimbang dibagi dengan tingkat input tertimbang.<sup>11</sup> Efisiensi juga bisa diartikan sebagai rasio antara output dengan input. Ada tiga faktor yang menyebabkan efisien, yaitu:

1. Apabila dengan input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar.
2. Input yang lebih kecil dapat menghasilkan output yang sama.
3. Dengan input yang lebih besar dapat menghasilkan output yang lebih besar lagi.<sup>12</sup>

8 Ulbert Silalahi, Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi, (Bandung: Sinar Baru Alqansirdo, 2005), hlm. 43.

9 Zaenal Abidin dan Endri, "Kinerja Efisiensi Teknis Bank Pembangunan Daerah: Pendekatan Data Envelopment Analysis", Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. II, No. 1, Mei 2009, hlm. 22.

10 M.J. Farrell, "The Measurement of Productive Efficiency", Journal of the Royal Statistical Society Series A (General), Vol. 120, No.3, Tahun 1957, hlm. 299.

11 Permono Iswardono S dan Darmawan, "Analisis Efisiensi Industri perbankan di Indonesia (studi kasus Bank-Bank Devina di Indonesia Tahun 1991-1996)", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Tahun.2000, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 2.

12 Iwan Gumilar dan Siti Komariah, "Pengukuran Efisiensi Kinerja dengan Metode Stochastic Frontier Approach pada Perbankan Syariah", Jurnal Bisnis dan Manajemen, No. 2, Januari 2011, Vol. 7, hlm. 43.

Terdapat empat faktor yang menyebabkan efisiennya suatu lembaga keuangan, yaitu:

1. Faktor utama adalah efisien karena arbitrase informasi,
2. Efisien karena ketepatan penilaian aset-asetnya,
3. Efisien karena lembaga tersebut mampu mengantisipasi resiko yang muncul,
4. Efisiensi fungsional, yaitu berkaitan dengan administrasinya.<sup>13</sup>

Pengertian efisiensi menurut Islam tidaklah sama menurut teori ekonomi konvensional. Hal ini karena orientasi kehidupan seorang muslim tidaklah terbatas hanya pada dunianya saja, tetapi adanya integrasi kehidupan dunia dan akhirat, di mana dunia hanyalah ladang bagi kehidupan di akhirat.<sup>14</sup> Maka istilah efisiensi dalam kacamata Islam tidaklah bebas nilai.

Efisiensi kinerja suatu perusahaan dapat dicapai dengan usaha yang optimal, dan hasil dari usaha tersebut menghasilkan suatu keuntungan, yang akan disebut bahwa kinerja perusahaan tersebut telah mencapai tingkat efisiensi. Dalam Islam, perwujudan keuntungan yang optimal dihasilkan melalui usaha yang optimal (kerja keras) untuk menghasilkan sesuatu secara optimal dengan tetap menjaga keseimbangan (*ta'adul*) dan etika syariah. Keuntungan yang dihasilkan harus seimbang dengan kerja keras dan beban yang dikeluarkan. Keseimbangan berarti bahwa dalam mewujudkan *value added*, produsen mesti memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.<sup>15</sup> Untuk mewujudkan optimisasi dan keseimbangan, Islam memberikan beberapa *guidance*, di antaranya:

1. Memanfaatkan seluruh potensi sumber daya alam
2. Spesialisasi kerja

13 Sya'ib Astiyah dan Jardine A. Husman, "Fungsi Intermediasi dalam Efisiensi Perbankan Di Indonesia: Derivasi Fungsi Profit", Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 8, No. 4, Maret 2006, hlm. 529-543.

14 Ahmad Arisalul Cholik, "Teori Efisiensi dalam Ekonomi Islam", Jurnal Ekonomi Islam, No. 2, Juli 2013, Vol. 1, hlm. 174.

15 M.Mahbubti Ali dan Ascarya, Analisis Efisiensi Baitul Maal Wat Tamwil dengan Pendekatan Two Stage Data Envelopment Analysis (Studi Kasus Kantor I URANG BMT MMU dan BMT UGT Sidogiri), Islamic Finance and Business Review, Vol. 8, No.2 Agustus-Desember 2010, Bogor: Tazkia, hlm. 113-114.

3. Larangan terhadap riba
4. Larangan *israf* dan *tabudzir* dalam produksi.<sup>16</sup>

Efisiensi kinerja atau *Technical Efficiency* Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dapat diukur dengan membandingkan antara input dan output. Efisiensi sangat erat kaitannya dengan teori ekonomi produksi, karena dalam produksi ada proses pengolahan input menjadi output. Input adalah sumber daya yang ditujukan, digunakan, atau dikonsumsi dalam menjalankan program organisasi.

Dua faktor produksi yang paling penting dalam organisasi pengelola zakat adalah modal dan tenaga kerja. Modal adalah seperangkat sarana yang dipergunakan oleh para pekerja dalam hal ini adalah modal yang digunakan oleh *amil* dalam operasional organisasi pengelola zakat. Tenaga kerja adalah orang yang menghabiskan waktu untuk bekerja dalam organisasi pengelola zakat. Tiap unit tenaga kerja membutuhkan peningkatan modal untuk tiap unit penggunanya, proporsi yang benar dalam penggunaan modal dalam produksi memberikan peningkatan pada bentuk istimewa dari menu produksi untuk menghasilkan tingkat keluaran (output) yang lebih tinggi.<sup>17</sup>

Faktor-faktor output dalam organisasi pengelola zakat merupakan produk yang menjadi tujuan organisasi pengelola zakat. Pengukuran output diukur dari penerimaan dana dan penyaluran dana.<sup>18</sup> Semakin banyak penerimaan dana berarti semakin banyak *muazikki* yang mempercayakan dana zakatnya kepada organisasi pengelola zakat mencerminkan aktivitas kinerja organisasi pengelola zakat yang dilakukan sudah baik, dan mencerminkan seberapa baik organisasi pengelola zakat mensosialisasikan kinerja organisasi pengelola zakat sebagai

lembaga yang memiliki tugas utama untuk menghimpun dan mendistribusikan dana zakat dari dan untuk umat.

## E. MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT

Pengelolaan zakat sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1, yaitu terdapat dua model organisasi yang mengelola zakat. *Pertama*, zakat dikelola lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ). *Kedua*, zakat dikelola lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Tetapi dalam pelaksanaannya, pemerintah lebih memosisikan diri sebagai regulator dan fasilitator dalam rangka memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan dengan baik dan diperuntukkan demi kemaslahatan umat. Sementara untuk model kedua, masyarakat memiliki wewenang yang besar untuk mengelola zakat, akan tetapi diharuskan berkoordinasi, melaporkan, dan siap dibina oleh pemerintah.<sup>19</sup>

Program pendayagunaan dana zakat untuk penanggulangan kemiskinan akan semakin optimal apabila sinergi antara pemerintah, organisasi pengelola zakat, dan masyarakat terjadi dengan baik. Sinergi tersebut perlu dibangun turus-menerus serta diperkuat demi tujuan pengelolaan zakat itu sendiri. Sinergi tersebut dapat digambarkan dalam bagan berikut:

16 Ahmad Arisatul Cholik, Teori Efisiensi..., hlm. 180.

17 Retno Wulandari, "Analisis Efisiensi Lembaga Zakat Nasional di Indonesia Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA), Periode 2011-2012", Naskah Publikasi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, hlm. 4.

18 Ibid., hlm. 5.

19 Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Perberdayaan Zakat, "Standarisasi Amil Zakat di Indonesia: Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat", Tahun 2013, hlm. 45.

**Gambar 2**  
**Sinergitas Pemerintah, OPZ, dan Masyarakat**



Sumber: Kementerian Agama RI<sup>20</sup>

Sinergi antara peran negara dan masyarakat sangat diperlukan karena pengelolaan zakat membutuhkan skala prioritas, kerjasama. Dan data-data yang komprehensif untuk pendayagunaan zakat. Dengan dibentuknya lembaga khusus yang mengani pengelolaan zakat, lembaga tersebut berfungsi seperti *holding company* yang memiliki hubungan sinergis dengan lembaga-lembaga di bawahnya, juga lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat.

#### F. KONSEP KEMISKINAN

Kemiskinan adalah keadaan penghidupan dimana orang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan dzururiyah, hajiyah, dan tahnisiyah. Pengertian dari kemiskinan terkait dengan kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat antara satu tingkatan pendapatan dengan tingkat pendapatan lainnya, bahkan masalah kemiskinan relatif bukanlah masalah kemiskinan akan tetapi masalah kesenjangan. Sedangkan kemiskinan absolut adalah suatu keadaan kemiskinan yang ditentukan terlebih dahulu

menetapkan garis tingkat pendapatan diatas tingkat pendapatan minimum tersebut dikategorikan sebagai bukan orang miskin.<sup>21</sup>

Penyebab utama kemiskinan adalah karena kelemahan dari segi modal. Lingkaran kemiskinan demikian menyisahkan variable lain yaitu variabel sosial, budaya, dan politik.

Menurut perspektif Islam, kemiskinan timbul karena berbagai sebab struktural, yaitu:

1. Kemiskinan timbul karena kejahatan manusia terhadap alam sehingga manusia itu sendiri yang kemudian merasakan dampaknya.
2. Kemiskinan timbul karena ketidakpedulian dan kebaklian kelompok kaya, sehingga si miskin tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.
3. Kemiskinan timbul karena sebagian manusia bersikap zhalim, eksploitatif, dan menindas kepada sebagian manusia yang lain, seperti memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil, memakan harta anak yatim, dan memakan harta riba.
4. Kemiskinan timbul karena konsentrasi kekuatan politik, birokrasi, dan ekonomi di satu tangan.
5. Kemiskinan timbul karena gejolak eksternal seperti bencana alam atau peperangan sehingga negeri yang semula kaya berubah menjadi miskin.<sup>22</sup>

Berbagai faktor yang menjadi penyebab kemiskinan tersebut, jika diamati maka faktor yang mendominasi adalah faktor sumber daya manusia yang amat rendah dan sisinya adalah faktor dari kebijakan sistem perekonomian yang diterapkan.

Islam memandang bahwa kemiskinan sebenarnya bermula dari kegagalan kaum muslimin dalam mengelola sumber penghasilan. Islam tidak menyukai kemiskinan dan sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun demikian, ada suatu kondisi di mana seorang berada dalam kondisi yang kurang beruntung sehingga

<sup>21</sup> Muhammad dan Ridwan Mas'ud, Zakat..., hlm. 70.

<sup>22</sup> Yusuf Wibisono, Mengelola Zakat Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2015).

ia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Disinilah esungguhnya Islam telah membentuk mekanisme support sosial untuk mengatasi masalah kemiskinan, yakni dengan mendorong setiap muslim agar menolong saudaranya yang membutuhkan.<sup>23</sup> dalam Al-Quran disebutkan pada surat al-Maarij ayat 24-25.

وَلَيْسَتْ بِنِعْمَةٍ مَّنْ تَنْهَىٰ لِتُنَاهَىٰ وَالْمُخْرَجُ

*an orang-orang yang dalam hartaunya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai pu-pu (yang tidak mau meminta).*<sup>24</sup>

#### NALISISTINGKATEFISIENSI KINERJA ORGANISASI ENGELOLA ZAKAT (OPZ) DI INDONESIA

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dikatakan efisiensi apabila nilainya mencapai angka 100% atau setara dengan 1. berikut hasil pengolahan variabel input dan output dengan software DEAP2.1, yang menunjukkan tingkat efisiensi Organisasi pengelola Zakat (OPZ) dari tahun 2012-2015.

abel 1

Rata-Rata Tingkat Efisiensi OPZ  
periode 2012-2015

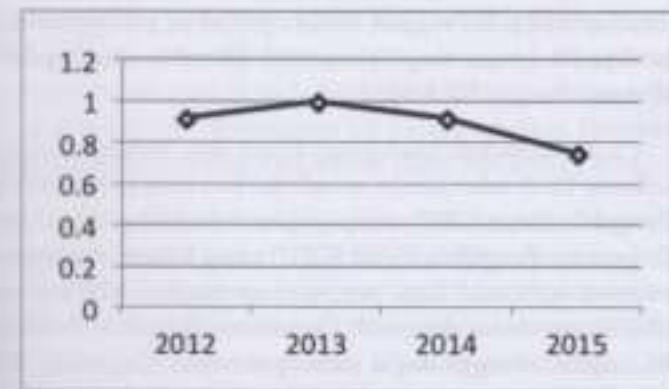
ahun	Mean
012	.917
013	.991
014	.913
015	.747

<sup>23</sup> Nurul Huda, dkk. Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah. (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 110.

erdasarkan tabel 4.9 dapat disimpulkan dalam bentuk urva berikut ini:

ambar 3

Kurva Tingat Efisiensi OPZ Tahun 2012-2015



erdasarkan kurva tersebut dijelaskan bahwa tingkat efisiensi kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia pada tahun 2013 cenderung lebih mendekati nilai optimum efisiensi dibanding dengan tahun 2012 dan 2014. Pada tahun 2013 tingkat efisiensi kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia hampir mendekati tingkat efisiensi optimum dengan nilai mencapai angka 100% atau setara dengan 1, yaitu mencapai nilai 0.991, dibandingkan dengan tahun 2012, 2014, dan 2015 tingkat efisiensi kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di indonesia mencapai nilai 0.917, 0.913, dan 0.747.

asil pengolahan data keuangan kelima OPZ dari tahun 012 sampai pada tahun 2014 menunjukkan bahwa terdapat empat OPZ yang mencapai tingkat nilai efisiensi yang optimum (100% atau setara dengan 1). Keempat OPZ menunjukkan tingkat nilai efisiensi yang optimum setiap tahunnya dari tahun 2012 sampai pada tahun 2014 yaitu Rumah Zakat, Dompet Dhuafa, AZNAS, dan BMH. Sedangkan salah satu dari kelima OPZ

belum menunjukkan tingkat nilai efisiensi yang optimum pada setiap tahunnya, OPZ tersebut adalah PKPU.

Hasil pengelahan data keuangan kelima OPZ pada tahun 2015 mengalami penurunan tingkat efisiensi, sehingga dari kelima OPZ tersebut terdapat dua OPZ yang dinyatakan belum efisien atau ineffisien, yaitu BMH dan PKPU. Kedua OPZ tersebut menjadi evaluasi, bahwa perlunya peningkatan efisiensi kinerjanya dengan target yang telah diberikan dalam perhitungan efisiensi dengan DEAP.<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan software DEA tidak hanya menunjukkan nilai efisiensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), tetapi juga menunjukkan target perbaikan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang belum mencapai tingkat efisiensi optimum agar tercapainya tingkat efisiensi optimum (100% atau setara dengan 1) Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia sehingga dapat mencapai tujuan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, serta dapat berperan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

## H. ANALISIS IMPLIKASI EFISIENSI KINERJA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ) TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA

Berkaitan dengan tingkat kemiskinan, diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2012 mencapai 29,13 juta orang (11,96%), berkurang 0,89 juta orang (0,53%) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49%).<sup>22</sup> Pada bulan September 2013, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,55 juta orang (11,47%), bertambah sebanyak 0,48 juta

orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang sebanyak 28,07 juta orang (11,37%).<sup>23</sup>

Pada September 2014, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,73 juta orang (10,96%), berkurang sebesar 0,55 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2014 yang sebesar 28,28 juta orang (11,25%), dan berkurang sebesar 0,87 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2013 yang sebesar 28,60 juta orang (11,46%).<sup>24</sup> Penurunan ini terjadi sebelum Pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM pada November 2014.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2015 mencapai 28,59 juta orang (11,22%). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada September 2014, maka selama enam bulan tersebut terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 0,86 juta orang. Sementara apabila dibandingkan dengan Maret tahun sebelumnya jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan sebanyak 0,31 juta orang. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan salah satu faktor yang terkait dengan peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode September 2014 – Maret 2015 adalah terjadinya inflasi sebesar 4,03% dan rata-rata harga beras mengalami peningkatan sebesar 14,48%.<sup>25</sup>

<sup>21</sup> Berita Resmi Badan Pusat Statistik (BPS) No. 45/07/Th. XV, 2 Juli 2012, hlm. 1.

<sup>22</sup> Berita Resmi Badan Pusat Statistik (BPS) No. 06/01/Th. XVIII, 2 Januari 2014, hlm. 1.

<sup>23</sup> Berita Resmi Badan Pusat Statistik (BPS) No. 86/09/Th. XVIII, 15 September 2014, hlm. 1-2.

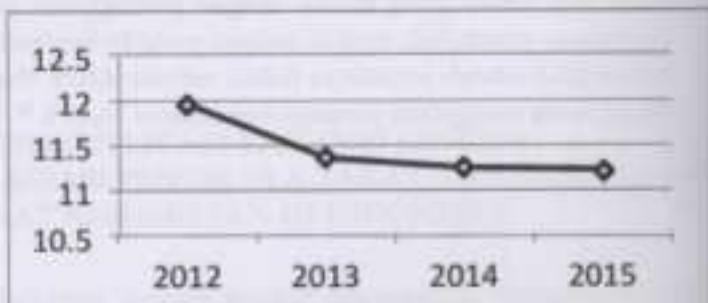
**abel 2**  
**tingkat Kemiskinan di Indonesia**  
**ahun 2012-2015**

Tahun	Tingkat Kemiskinan
2012	11,46%
2013	11,37%
2014	11,25%
2015	11,22%

umber: Data diolah dari BPS 2012-2015

erdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa terjadinya perubahan tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Berikut kurva yang menggambarkan tingkat kemiskinan di Indonesia.

**ambar 5**  
**tingkat Kemiskinan di Indonesia 2012-2015**



Sumber: Kurva diolah dari data BPS 2012-2015

ari kurva tersebut dijelaskan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2012 sampai tahun 2015 mengalami penurunan yang signifikan. Karena pada tahun 2012 sampai tahun 2013 tingkat kemiskinan menurun sebanyak 0,59%, pada akhirnya pada tahun 2014 tingkat kemiskinan mengalami

kemiskinan menurun sebanyak 0,03%. Artinya, penurunan tingkat kemiskinan tersebut adalah hasil usaha dari kebijakan pemerintah pada kemiskinan.

Berdasarkan perhitungan tingkat efisiensi kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia pada tahun 2012 sampai tahun 2015 dengan DEA, menyatakan bahwa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia telah mencapai tingkat efisiensi meskipun belum mencapai tingkat efisiensi optimumnya yaitu pada nilai 100% atau setara dengan 1.

Untuk dapat mengetahui gambaran ringkas mengenai efisiensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan tingkat kemiskinan di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3**

**Rekapitulasi Tingkat Efisiensi OPZ dan Kemiskinan di Indonesia Periode 2012-2015**

Tahun	Tingkat Efisiensi	Tingkat Kemiskinan
2012	91,7%	11,46%
2013	99,1%	11,37%
2014	91,3%	11,25%
2015	74,7%	11,22%

Sumber: Data diolah tahun 2016

Efisiensi yang diperoleh oleh OPZ pada penelitian ini merupakan perhitungan yang didasari pada rasio input dan output sebagai variabel independen yang kemudian digunakan untuk mengetahui implikasinya terhadap tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen pada penelitian ini. Berdasarkan rasio input dan output, dikatakan efisien apabila dengan input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar. Sebagaimana pada penelitian ini diketahui bahwa nilai input kelima OPZ dengan besaran yang sama dapat melakukan penghimpunan

dan penyaluran dana zakat sesuai dengan program yang telah dilakukan.

Selain itu, kelima OPZ ini memiliki input yang kecil namun dapat menghasilkan output yang sama baik dana yang terhimpun maupun dana tersalurkan. Faktor selanjutnya yaitu dengan input yang lebih besar maka dapat menghasilkan output yang lebih besar lagi. Artinya bahwa kelima OPZ ini mampu memiliki input baik berupa aktiva maupun biaya operasional yang besar, maka dapat menghasilkan output yang terdiri dari dana terhimpun dan dana tersalur yang lebih besar juga.

Parameter pengukuran efisiensi pada lembaga dalam hal ini OPZ berdasarkan beberapa faktor, yaitu pertama efisiensi karena arbitrase informasi. Kelima OPZ tersebut telah secara efisien dalam memperoleh informasi yang berkembang terkait pendayagunaan zakat secara optimal dan disesuaikan dengan program-program yang dibentuk agar mampu mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran dana zakat.

Kedua, efisiensi karena ketepatan dalam menilai aset-asetnya. Dalam hal ini kelima OPZ telah melaporkan aset-aset yang dimilikinya dalam laporan keuangan secara berkala dan dipublikasikan. Sehingga besaran aset yang dimilikinya dapat diketahui untuk kemudian menjadi item dalam menilai tingkat efisiensinya serta dapat dialokasikan secara efisien dalam kegiatan operasionalnya.

Ketiga, efisiensi karena lembaga mampu mengantisipasi risiko yang muncul. OPZ sebagai lembaga pengelola zakat tentunya sangat rentan dengan risiko yang muncul seperti dana yang disalurkan tidak produktif, penerima dana sesuai dengan ketentuan, dan lain-lain. Dalam hal ini, kelima OPZ dinilai telah efisien dalam meminimalisir risiko yang muncul sebagaimana program-program yang dibentuk dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat telah jelas dan berjalan secara berkelanjutan.

Keempat, efisiensi dalam administrasi. Kelima OPZ dinilai telah efisien dalam bidang administrasi dimana kelimanya telah

menyajikan data operasional dan keuangan secara baik dibuktikan dengan data administrasi telah dipublikasikan secara periodik tahunannya pada website masing-masing OPZ.

Keempat parameter di atas telah menunjukkan bahwa OPZ yang menjadi sampel pada penelitian ini telah efisien dalam operasionalnya. Pengelolaan zakat secara efisien yang dilakukan oleh OPZ berupa penghimpunan dana dengan berbagai program yang telah diupayakan dan disalurkan secara dialogis di berbagai bidang sebagaimana yang dilakukan oleh kelima OPZ tersebut, menunjukkan adanya implikasi terhadap penekanan angka kemiskinan.

Tingkat kemiskinan yang semakin menurun setiap tahunnya, diindikasikan sebagai salah satu dari kontribusi pengelolaan zakat yang efisien. Kelima OPZ tersebut mewakili OPZ di Indonesia telah berkontribusi dalam perbaikan ekonomi negara nasional. Program-program tersebut akan terus berjalan dan berkelanjutan sebagai upaya mengoptimalkan peran dan fungsi zakat sebagai salah satu instrumen keuangan Islam yang memiliki kontribusi dalam pengentasan kemiskinan.

Kinerja OPZ yang telah mencapai tingkat efisiensinya dan program-program kerjanya berimplikasi atau memberi dampak yang baik dalam pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, dengan adanya tingkat efisiensi kinerja OPZ di atas, maka OPZ sebagai bagian dari pihak yang berkepentingan dalam pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan dana zakat telah memberikan kontribusi dengan kinerja yang efisien untuk meresek angka kemiskinan di Indonesia.

## I. KESIMPULAN DAN SARAN

Tingkat efisiensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia pada tahun 2012 sampai dengan 2014 menunjukkan bahwa OPZ telah efisien dalam mengelola zakat dengan besaran perolehan pada tahun 2012 sebesar 0,917, 2013 sebesar

0,991, 2014 sebesar 0,913, dan 2015 sebesar 0,747. Kelima OPZ yang menjadi sampel pada penelitian ini yang mewakili OPZ di Indonesia memiliki tingkat efisiensi yang mendekati titik efisiensi optimum, dimana suatu OPZ dikatakan efisiensi optimum apabila memperoleh nilai efisiensi sebesar 100% atau setara dengan 1 (satu).

Perolehan tingkat efisiensi OPZ di Indonesia yang menunjukkan pencapaian efisiensi dalam pengelolaan zakat berimplikasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, dimana perolehan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2012 sampai dengan 2015 mengalami penurunan yang signifikan. Dengan demikian, adanya OPZ yang mengelola zakat secara efisiensi dapat menjadi salah satu kontribusi dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui berbagai program baik penghimpunan maupun penyalur secara berkelanjutan.

Keberhasilan suatu OPZ dalam mengelola zakat dapat dilihat salah satunya dengan tingkat efisiensinya. Melalui publikasi laporan keuangan secara tertib dan berkala dapat memudahkan berbagai pihak untuk mengetahui dan menilai sejauh mana efisiensi OPZ dalam melakukan tugasnya. Sehingga, kedepan diharapkan mampu menjadi tolak ukur untuk evaluasi kinerja agar dapat mencapai tingkat efisiensi yang optimum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Wahab, Norazlina dan Abdul Rahim Abdul Rahman., 2011. "Efficiency of Zakat Institutions in Malaysia: an Application Data Envelopment Analysis", *Journal of Economic Cooperation and Development*, Vol. 33, No. 1.
- Aldina, Zaenal dan Endri., 2009, "Kinerja Efisiensi Teknis Baitul Maal dan Pembangunan Daerah: Pendekatan Data Envelopment Analysis", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 11, No. 1.
- Abdul Ismail HJ, dan Masturah Ma'in., 2014. "The Efficiency of Zakat Collection and Distribution: Evidence from Two Stage Data Envelopment Analysis", *Journal of Economic Cooperation and Development*, Vol. 33, No. 3.
- Abuzal Hafizir, Farah Aida, dkk., 2012, "Zakat and Poverty Alleviation Roles of Zakat Institutions in Malaysia", *International Journal of Arts and Commerce*, Vol. 1, No. 7.
- BH. M.Mahabibi dan Ascarya., 2010, *Analisis Efisiensi Baitul Maal Wilayah dengan Pendekatan Two Stage Data Envelopment Analysis Pada Kasus Kantor Cabang BMT MMU dan BMT UGT Sulogiri*, Islamic Finance and Business Review, Vol. 5, No.2, Bogor, Tarkia.
- Amryah, SH dan Jardine A. Husman., 2006, "Fungsi Intermediaries dalam Efisiensi Perbankan Di Indonesia: Derivasi Fungsi Profit", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol. 8, No. 4.
- Bappenas, 1993, *Perspektif Teoritis Konsep Dasar Pengembangan Ekonomi Nasional*, (Jakarta: Bappenas).
- Berita Resmi Badan Pusat Statistik (BPS) No. 45/07/Th. XV, 2 Juli 2010
- Berita Resmi Badan Pusat Statistik (BPS) No. 06/01/Th. XVII, 2 Januari 2011

Berita Resmi Badan Pusat Statistik (BPS) No. 06/01/Th. XVIII, 2 Januari 2015.

Berita Resmi Badan Pusat Statistik (BPS) No. 86/09/Th. XVIII, 15 September 2015.

Berger, Allen N. dan David B. Humphrey., 1997, "Efficiency of Financial Institutions: International Survey and Directions for Future Research", *Financial Institutions Center*.

Cholik,Ahmad Arisatul., 2013, "Teori Efisiensi dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi Islam*, No. 2, Vol. 1.

Farrell,M.J.,1957, "The Measurement of Productive Efficiency", *Journal of the Royal Statistical Society, Series A (General)*, Vol. 120, No.3.

Gumilar, Ivan dan Siti Komariah., 2011,"Pengukuran Efisiensi Kinerja dengan Metode Stochastic Frontier Approach pada Perbankan Syariah", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, No. 2, Vol. 7.

Huda,Nurul, dkk., 2012,*Kewangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana).

Islam, M. Irfan., 2003,*Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara).

Ismail, Abdul Ghafar, dan Bayu Taufiq Possumah., 2013, "Theoretical Model for Zakat-Based Islamic Microfinance Institutions in Reducing Poverty", *International Research Journal of Finance and Economics*, Issue 103.

Iswardono S, Permono dan Darmawan., 2000, "Analisis Efisiensi Industri perbankan di Indonesia (studi kasus Bank-Bank Devisa di Indonesia Tahun 1991-1996)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Perberdayaan Zakat, 2013, "Standarisasi Amil Zakat di Indonesia: Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat".

Muharam, Harjum dan Rizki Pusvitasa, 2007, "Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Syariah di Indonesia dengan Metode Data Envelopment Analysis: Periode Tahun 2005", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, No. 3, Vol. II.

Rusydiana,Aam Slamet.,2013, *Mengukur Tingkat Efisiensi dengan Data Envelopment Analysis*, (Bogor: Smart Publishing).

Rozalinda., 2015,*Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers).

Setyawan,Setu., 2006,*Pengukuran Kinerja Anggaran Keuangan Daerah Pemerintah Dilihat dari Perspektif Akuntabilitas*, (Yogyakarta: UGM).

Silalahi,Ulbert., 2005,*Studi Tentang Ilmu Administrasi Konsep, Teori dan Dimensi*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo).

Sugiyono., 2016,*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta).

Wibisono,Yusuf., 2015,*Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Kencana).

Winarno,Budi., 2002,*Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo).

Wulandari,Retno., 2014, "Analisis Efisiensi Lembaga Zakat Nasional di Indonesia Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) Periode 2011-2012", *NaskahPublikasi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.